



# **RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

## **TAHUN 2021 - 2026**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI KALIMANTAH TENGAH**  
**TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Daftar Isi .....	1
Daftar Tabel.....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>12</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>21</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	22
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	32
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	37
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>39</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	39
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel T-C.23 .....	18
Tabel T-C.24 .....	19
Tabel T-C.25 .....	40
Tabel T-C.26 .....	41
Tabel T-C.27 .....	43
Tabel T-C.28 .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### **1.1.1. Pengertian Rencana Strategis**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen rencana stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

#### **1.1.2. Fungsi Rencana Strategis**

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai :

- a. Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Sebagai kontrak kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah; dan

- e. Sebagai landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **1.1.3. Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah**

- a. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahapan persiapan penyusunan Renstra PD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

- 1) Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD
- 2) Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra PD
- 4) Pengumpulan Data dan Informasi

- b. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis PD

Tahap penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah terdiri dari dua tahap, yaitu: 1. Tahap perumusan rancangan Renstra PD; dan 2. Tahap penyajian rancangan Renstra PD.

- 1) Tahap Perumusan Rancangan Renstra PD

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah sangat menentukan kualitas dokumen Renstra Perangkat Daerah yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper). Perumusan kertas kerja dan keseluruhan tahap penyusunan

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra PD secara terintegrasi antara visi dan misi Kepala Daerah dengan penjabaran Program dan Kegiatan.

2) Tahap Penyajian Rancangan Renstra PD

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis ke dalam naskah rancangan Renstra PD, sesuai dengan sistematika penulisan.

**1.1.4. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.**

a. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :

- 1) Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai dokumen teknis dalam penjabaran RPJMD.
- 2) Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau tugas/fungsi pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah serta berkoordinasi dengan Bappedalitbang.

b. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan berupa kompilasi rencana kerja setiap tahun.

## **1.2 Landasan Hukum**

Beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah adalah Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, adalah :

- 1) Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah terkait Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.



- 2) Menjadi acuan kerja resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 3) Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Polittik Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sub bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Sub bab ini memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur: struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Sub bab ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sub bab ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kab/kota (untuk prov), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

#### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah,  
Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah**

##### **2.2.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas, fungsi dan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

b. Fungsi

- 1) Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia pada Badan;
- 3) Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
- 4) Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

##### **2.2.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat membawahkan:

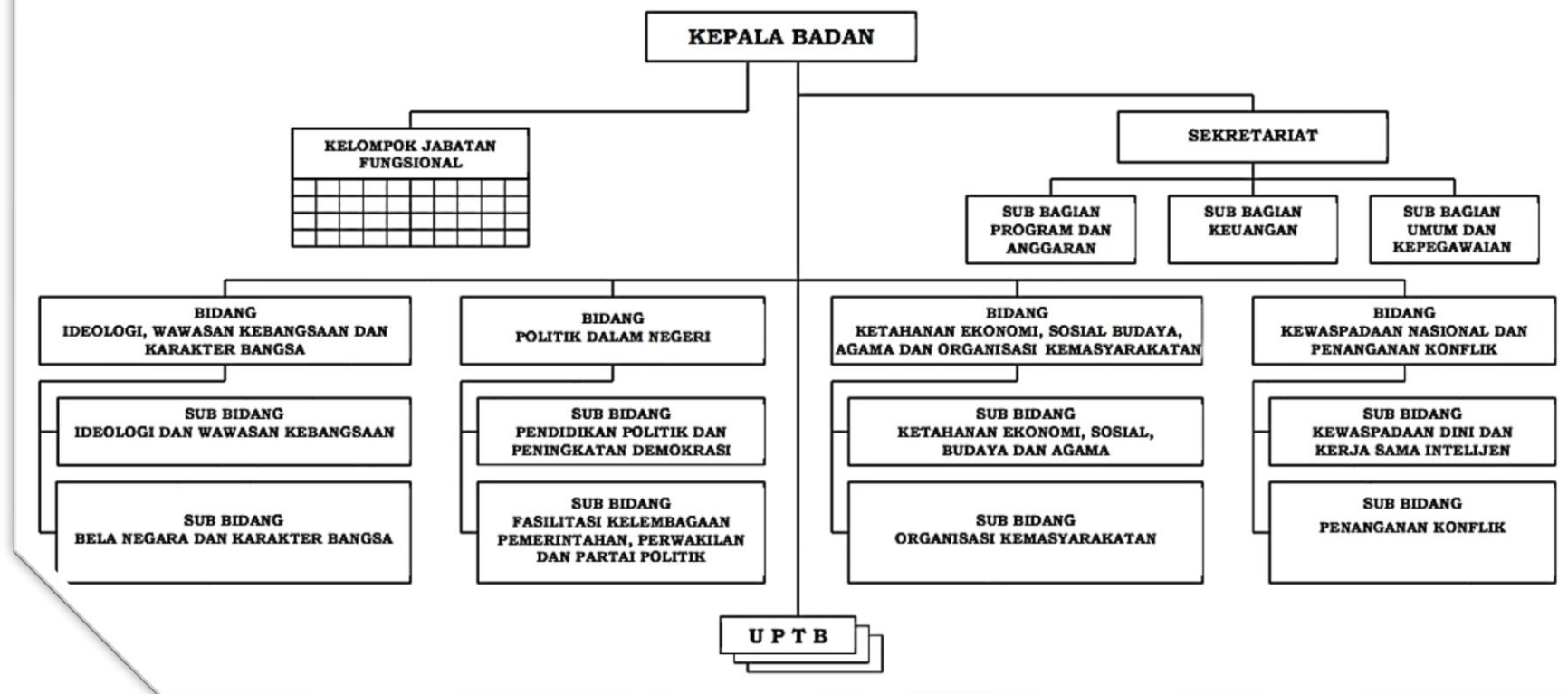
- 1) Sub Bagian Program dan Anggaran;
- 2) Sub Bagian Keuangan; dan

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- c. Bidang terdiri dari:
- 1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan:
    - a) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
    - b) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa,
  - 2) Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
    - a) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
    - b) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
  - 3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, membawahkan:
    - a) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
    - b) Sub Bidang Organisasi Masyarakat,
  - 4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
    - a) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
    - b) Sub Bidang Penanganan Konflik,
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan Unit Pelaksana Teknis Badan.

**Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Tengah**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 35 TAHUN 2020  
TANGGAL 6 AGUSTUS 2020**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber daya Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel berikut :

**Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S-3	1	-	1
2	S-2	5	-	5
3	S-1	14	7	21
4	D-3	1	-	1
5	SMA/Sederajat	5	1	6
6	SMP/Sederajat	-	-	-
<b>Total</b>		<b>26</b>	<b>8</b>	<b>34</b>

Dari jumlah 36 orang komposisi ASN berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongannya dapat dilihat di tabel berikut :

**Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat / Golongan**

No	Pangkat / Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	II/b	-	-	0
2	II/c	2	-	2
3	II/d	2	-	2
4	III/a	-	3	3
5	III/b	6	1	7
6	III/c	4	3	7
7	III/d	7	1	8
8	IV/a	1	-	1
9	IV/b	3	-	3
10	IV/c	1	-	1
<b>Total</b>		<b>26</b>	<b>8</b>	<b>34</b>

Komposisi ASN berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban sebagaimana tabel berikut :



**Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan  
Struktural dan Fungsional**

No	Struktural dan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II A	1	-	1
2	Eselon III A	4	-	4
3	Eselon IV A	6	2	8
4	Fungsional	15	6	21
<b>Total</b>		<b>26</b>	<b>8</b>	<b>34</b>

**2.2.2 Sarana dan Prasarana /Asset**

Sarana dan prasarana merupakan penunjang didalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Sarana dan prasarana yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari APBD. Sarana dan Prasarana yang dimiliki sebagai berikut :

**Tabel Sumber Daya Berupa Sarana dan Prasarana**

NO	URAIAN	ASET TETAP				JUMLAH ASET TETAP	
		ASET BAIK		ASET KURANG BAIK		JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA
		JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA		
<b>I</b>	<b>TANAH</b>	<b>1</b>	<b>2,932,800,000.00</b>			<b>1</b>	<b>2,932,800,000.00</b>
01	TANAH	1	2,932,800,000.00			1	2,932,800,000.00
<b>II</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>493</b>	<b>2,798,182,083.00</b>			<b>561</b>	<b>3,160,345,475.00</b>
01	ALAT BESAR						
02	ALAT ANGKUTAN	21	1,073,168,208.00			21	1,073,168,208.00
03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR						
04	ALAT PERTANIAN						
05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	344	854,067,525.00	68	362,163,392.00	412	1,216,230,917.00
06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	25	103,526,100.00			25	103,526,100.00
07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN						
08	ALAT LABORATORIUM						
09	ALAT PERSENJATAAN	1	21,300,000.00			1	21,300,000.00
10	KOMPUTER	102	746,120,250.00			102	746,120,250.00
11	ALAT EKSPLORASI						
12	ALAT PENGEBORAN						
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN						
14	ALAT BANTU EKSPLORASI						
15	ALAT KESELAMATAN KERJA						
16	ALAT PERAGA						
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI						
18	RAMBU - RAMBU						
19	PERALATAN OLAH RAGA						
<b>III</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>1</b>	<b>4,353,438,309.50</b>				<b>5,335,191,429.50</b>
01	BANGUNAN GEDUNG	1	4,353,438,309.50				4,353,438,309.50
02	MONUMEN						
03	BANGUNAN MENARA						
04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI						
<b>IV</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>2</b>	<b>367,198,160.00</b>				<b>490,876,560.00</b>
01	JALAN DAN JEMBATAN						
02	BANGUNAN AIR	1	192,700,000.00				192,700,000.00
03	INSTALASI	1	174,498,160.00				174,498,160.00
04	JARINGAN						
<b>V</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>1</b>	<b>61,839,200.00</b>				<b>61,839,200.00</b>
01	BAHAN PERPUSTAKAAN	1	61,839,200.00				61,839,200.00
02	BARANG BERCORAK KESENIAN / KEBUDAYAAN / OLAHRAGA						
03	HEWAN						
04	BIOTA PERAIRAN						

NO	URAIAN	ASET TETAP				JUMLAH ASET TETAP	
		ASET BAIK		ASET KURANG BAIK		JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA
		JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA		
05	TANAMAN						
06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA						
07	ASET TETAP DALAM RENOVASI						
<b>VI</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>						
01	TANAH						
02	PERALATAN DAN MESIN						
03	GEDUNG DAN BANGUNAN						
04	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI						
05	ASET TETAP LAINNYA						
	TANAH	1	2,932,800,000.00			1	2,932,800,000.00
01	TANAH	1	2,932,800,000.00			1	2,932,800,000.00

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel T-C.23.

Tabel T-C.23.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Pembinaan terhadap Ormas/LSM/OKP aktif		Jumlah Ormas/LSM/OKP aktif		142	150	158	165	170	180	142	158	158	165	0	-	100%	105%	100%	100%	0%	0%
2	Pembinaan partai politik di Provinsi Kalimantan Tengah		Jumlah Partai Politik Provinsi		12	12	12	16	16	16	12	12	12	16	0	-	100%	100%	100%	100%	0%	0%
3	Indeks Demokrasi Indonesi (IDI) di Provinsi Kalimantan Tengah		Peringkat IDI		15	14	13	12	12	11	15	11	25	5	TAD	-	100%	79%	192%	42%	0%	0%
4	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan		1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	200	-	100%	100%	100%	100%	11%	0%
5	Jumlah kegiatan kerjasama pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak criminal		Jumlah Laporan/kegiatan		10	10	10	10	10	10	10	3	6	7	10	-	100%	30%	60%	70%	100%	0%
6	Kegiatan intelijen daerah dalam rangka deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum		Jumlah Laporan / kegiatan		3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%

Tabel T-C.24.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp)						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp)						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Belanja Langsung (BL)	6.616.495.520	8.903.330.000	11.270.876.482	12.106.401.365	16.672.298.487	11.821.139.500	6.416.234.752	8.449.377.328	10.495.395.855	10.106.850.194	6.573.297.531	2.279.886.749	96,97%	94,90%	93,12%	83,48%	39,43%	19,29%	15,44%	-9,42%
Belanja Tidak Langsung (BTL)	4.797.914.869	4.470.283.202	4.777.350.000	5.323.570.467	5.461.843.856	4.681.489.073	4.148.868.017	3.901.763.512	4.212.748.932	4.319.662.452	4.621.694.825	2.280.054.623	86,47%	87,28%	88,18%	81,14%	84,62%	48,70%	-0,04%	-7,82%
Total	11.414.410.389	13.373.613.202	16.048.226.482	17.429.971.832	22.134.142.343	16.502.628.573	10.565.102.769	12.351.140.840	14.708.144.787	14.426.512.646	11.194.992.356	4.559.941.372	92,56%	92,35%	91,65%	82,77%	50,58%	27,63%	9,46%	-9,52%

## **2.4 Tantangan dan Peluang**

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut :

### **1. Tantangan**

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah :

- a. Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat
- b. Penurunan Pemahaman terhadap ideologi Pancasila
- c. Pendidikan Politik masih rendah
- d. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat
- e. Munculnya LSM dan Ormas baru
- f. Adanya aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme
- g. Banyaknya pendatang mempengaruhi penurunan nilai-nilai kearifan lokal
- h. Perkembangan Teknologi Informasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat
- i. Kesenjangan sosial ekonomi cukup tinggi.

### **2. Peluang**

Peluang dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah :

- a. Kalimantan Tengah adalah Bumi Pancasila.
- b. Adanya forum-forum kemitraan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Tersedianya regulasi pelayanan pemberian rekomendasi dan atau perijinan penelitian.
- d. Perkembangan Teknologi dan Informasi.
- e. Keseragaman kodefikasi, klasifikasi program dan kegiatan urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Permendagri 90 tahun 2019.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Kalimantan Tengah dengan ibukotanya adalah Kota Palangka Raya terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota memiliki luas 157.983 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sekitar 2.490.178 jiwa, yang terdiri atas 1.299.013 laki-laki dan 1.191.165 perempuan (hasil SUPAS 2015).

Dengan luasan wilayah tersebut Provinsi Kalimantan Tengah didiami berbagai macam suku bangsa dari seluruh wilayah di Indonesia. Suku asli dan dominan di Kalimantan Tengah yaitu Suku Dayak, sedangkan suku dominan lainnya yakni Suku Banjar dan Suku Jawa. Dari segi agama di Provinsi Kalimantan Tengah juga terdapat 5 agama nasional yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu serta terdapat kepercayaan lokal yakni Kaharingan yang merupakan kepercayaan penduduk asli Kalimantan Tengah.

Adanya keanekaragaman suku, budaya, agama dan partai politik serta berbagai jenis kelembagaan tersebut menjadikan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah yang cukup rawan terjadinya perselisihan antar suku dan agama serta gesekan-gesekan yang berpotensi terjadinya konflik.

Masalah ketentraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Permasalahan keamanan dan ketertiban umum yang ditemui adalah masih tingginya jumlah tindak pidana di Provinsi Kalimantan Tengah. Data menunjukkan pada tahun 2019 jumlah tindak pidana di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 2.362 kasus.

Upaya penurunan konflik dilakukan dengan melakukan pemilihan strategi, kebijakan, dan program yang tepat dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi (mitra kerja) yang dibentuk untuk keperluan tersebut seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini. Namun demikian jika konflikpun terjadi maka akan diusahakan agar cepat diselesaikan secara optimal agar tidak berdampak luas.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Pendidikan politik masyarakat masih rendah.
- b. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun.
- c. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

#### **3.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: **“Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”**.

#### **3.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Dalam hal ini, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait langsung dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, adalah sebagai berikut :

1. Misi ke 2 **“Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global”**.

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana. Beberapa bencana yang sudah pernah terjadi, seperti bencana Tanah Longsor, Banjir, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung dan Gelombang genangan air pasang ROB), Kegagalan Teknologi, Epidemik dan Wabah Penyakit maupun bencana sosial. Dalam rangka penguatan dan ketangguhan daerah perlu adanya antisipasi dampak bencana berupa investasi menghadapi bencana baik pada tataran siaga bencana, tanggap bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Investasi bencana sangat diperlukan guna mitigasi risiko dan meminimalisir dampak bencana. Bencana tidak mungkin kita hindari dan kerugian akibat bencana tidak bisa dikesampingkan. Namun demikian, semakin siap dalam menghadapi bencana maka risiko yang timbul bisa diminimalisir. Kesiapan menghadapi bencana juga menjadikan proses pemulihan pasca bencana semakin cepat. Pada akhirnya ketahanan pasca bencana akan menguat.

Pengutan ketahanan Daerah merupakan cara untuk menunjukkan bahwa daerah atau negara dalam upaya penguatan masyarakat (community building), pengembangan wawasan kebangsaan, dan pembangunan nasional harus menasar pada aset dan modal sosial masyarakat. Aset dan modal sosial ini fokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat



masyarakat lokal Kalimantan Tengah. Potensi tersebut akan maksimal bila strategi dan pendekatan yang digunakan adalah community building.

Community building yang dimaksud adalah sebuah pendekatan dalam mengatasi masalah dan menciptakan peluang pengembangan bagi komunitas lokal dalam mengantisipasi perubahan dan ancaman perubahan global. Implementasinya adalah dengan membangun komunitas mulai level keluarga; para keluarga saling belajar untuk saling bergantung dan bekerja bersama untuk hal-hal tertentu yang dapat menciptakan kesadaran diri yang baru terkait dengan aset mereka, baik kolektif maupun individual. Dalam prosesnya, kerja bersama antar keluarga akan menciptakan modal sosial, kekeluargaan dan kemanusiaan. Modal tersebut akan menyediakan landasan baru bagi masa depan yang lebih menjanjikan. Melalui kerja bersama tersebut, para keluarga yang terikat sebagai kesatuan komunitas kemudian bisa membangun koneksi kembali (reconnection) dengan cita-cita (wawasan) kebangsaan untuk menghadapi persaingan dan ancaman globalisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 2, dirumuskan sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan, dan pusat-pusat kebudayaan beserta penguatan tokoh lintas agama sebagai penggerak peradaban dan pilar pembentuk kemajemukan;
- b. Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- c. Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19;
- d. Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan lokal.

2. Misi ke 5 “**Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender**”.

Pembinaan nilai-nilai religius atau keimanan sangat penting bagi masyarakat heterogen. Kalimantan Tengah yang heterogen tentu memiliki landasan filosofis yang kuat tentang kehidupan beragama. Nilai-nilai religius yang terkandung dalam setiap sikap dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara seharusnya menjadi perekat dalam menjalani kehidupan di tengah heterogenitas masyarakat Kalimantan Tengah yang memang dikenal memiliki keanekaragaman dalam hal suku, agama, ras serta golongan. Keanekaragaman ini patutlah menjadi kekayaan yang memberi warna bagi kehidupan masyarakat dan bukan menjadi sumber perpecahan dan konflik. Kalimantan Tengah sudah belajar banyak mengenai konflik horizontal dengan berbagai isu yang berkembang, sehingga sudah saatnya untuk merancang suatu strategi dan model kehidupan masyarakat yang tenteram dan nyaman di tengah heterogenitas dan pluralisme bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, pembinaan nilai luhur yang terkandung dalam agama dan budaya perlu dilakukan melalui berbagai upaya, seperti melalui proses pendidikan agama, latihan dan pembiasaan dan peneladanan. Dalam konteks sosio kultural, pendidikan merupakan proses untuk membudayakan nilai-nilai.

Selain meningkatkan peran religiusitas masyarakat dan nilai-nilai budaya local prosem pembangunan Kalimantan Tengah juga memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender. World Bank menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan komponen pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan secara efektif. Dalam konteks itulah jika negara kita mau membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan masalah secara khusus yang

berkaitan dengan kesetaraan gender (World Bank, 2001). Oleh sebab itu, kebijakan yang berwawasan gender sangat diperlukan, maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indikator atau pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan ini pula setiap pelaksanaan program akan selalu menunjukkan bentuk kesetaraan, keadilan, demokratis dan transparansi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut :

- a. Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- b. Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- c. Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- d. Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
- e. Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

### 3.2.3 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Program prioritas I : Belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan Dasar.

Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan seperti :

- a. Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat

- (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - c. Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
  - d. Pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - e. Pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan dan rencana pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh
  - f. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Program Prioritas II : Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari **“Makin BERKAH”** yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye : Makin BERKAH. Makin BERKAH merupakan 6 (enam) cita-cita pasangan **Gubernur H. Sugianto Sabran** dan **Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, S.sos., MM.** Kalimantan Tengah Periode 2021-2026. Enam cita-cita tersebut akan diwujudkan melalui pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Makin BERKAH merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi

pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 yaitu : **Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis.** Keenam citacita tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjelasan lebih detail mengenai sembilan bhakti tersebut sebagaimana berikut :

### **Berkah #1**

#### **Kalteng Bermartabat**

##### **Kalteng Unggul, Berdaya Saing, Dan Cemerlang**

Kalimantan Tengah Bermartabat, memfokuskan pada pencapaian meningkatnya daya saing daerah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi dan kearifan budaya lokal dalam rangka meneguhkan Kalteng yang *Belom Bahadat* (hidup beradat).

Dalam upaya mewujudkan Kalteng Bermartabat, maka diperlukan program prioritas sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menebus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir.
- ✓ Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit *Belom Bahadat* (hidup beradat) dalam berkompetisi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing tinggi dan berreputasi cemerlang.

### **Berkah #2**

#### **Kalteng Elok**

##### **Kalteng Indah, Hijau, dan Ramah**

Kalimantan Tengah Elok, merupakan manifestasi dari konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang melakukan upaya dan perencanaan dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang

berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan serta keindahan lingkungan.

Dalam upaya mewujudkan Kalteng Elok baik secara wilayah maupun masyarakatnya, maka diperlukan program prioritas sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan sertifikasi lahan masyarakat adat dan pengembangan ekonomi hijau;
- ✓ Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata lintas kabupaten atau kota, termasuk menjadikan lahan gambut dan hutan rawa terbesar di Indonesia sebagai ecotourism berkelas dunia.

### **Berkah #3**

#### **Kalteng Relegius**

##### **Kalteng Berkarakter Religius**

Kalimantan Tengah berkarakter relegius, merupakan merupakan karakter masyarakat yang taat kepada ajaran agama dan keyakinannya. Sebuah bentuk pengabdian atau kepasrahan manusia sebagai makhluk kepada Sang Pencipta atau Pencipta makhluk. Di Indonesia walaupun negara kita tidak menganut paham teokrasi atau negara berdasarkan agama, nilai karakter ini sangat penting bahkan yang pertama harus ditanamkan, sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan yang Maha Esa".

Dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kalteng Berkarakter Relegius, maka diperlukan program prioritas sebagai berikut:

- ✓ Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat sebagai pilar pembentukan karakter masyarakat Kalteng melalui program:
- ✓ memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dalam rangka perjalanan wisata religi misalnya para kyai dan ustadz naik haji dan umroh ke Mekkah, pendeta ziarah rohani ke Yerusalem, Hindu Kaharingan ke India;

- ✓ meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru ngaji, sekolah minggu dan guru spiritual di berbagai agama dan keyakinan masing-masing.

#### **Berkah #4**

#### **Kalteng Kuat**

#### **Kalteng Produktif, Sehat, dan Pintar**

Kalimantan Tengah Kuat, merupakan suatu kondisi masyarakat yang kuat secara ekonomi, kuat secara fisik, dan kuat secara intelektual. Kuat secara ekonomi, merupakan masyarakat yang mampu atau berdaya dari sisi produsersn atau mampu melakukan atau terlibat proses produksi khususnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya lokal, sehingga mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan. Produktifitas itulah yang berimplikasi pada tingkat pendapatan masyarakat. Dari pendapatan itulah akan tercipta kekuatan dari sisi konsumsi, artinya masyarakat mempunyai daya beli untuk menggerakkan perekonomian di Kalimantan Tengah.

Dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kalteng Kuat, maka diperlukan program prioritas sebagai berikut :

- ✓ Mempercepat pengembangan kawasan food estate sebagai penunjang cadangan logistic strategis untuk pertahanan negara, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal;
- ✓ Mempercepat program afirmatif dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana;
- ✓ Memperluas kuantitas dan kualitas penerima beasiswa Kalteng Berkah yang selama ini telah berjalan;
- ✓ Memastikan fasilitas dan layanan akses kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat melalui perawatan khusus secara gratis bagi pasien kurang mampu;
- ✓ Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas (Scalling Up) dalam rangka Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan dan Memperkuat Ekonomi Daerah melalui pengembangan Koperasi dan UMKM.

## Berkah #5

### Kalteng Amanah

#### Kalteng Jujur, Profesional, Kreatif dan Inovatif

Kalimantan Tengah Amanah merupakan elemen kunci dan mendasar dalam Kalteng Makin Berkah, dimana pemerintahan yang bersih dan anti korupsi menjadi sebuah komitmen mendasar. Secara umum, potensi anti korupsi ditemukan dalam dua kelompok besar, yaitu dalam penggunaan uang negara baik dari segi pendapatan maupun pembelanjaan, serta dalam penentuan kebijakan termasuk perizinan, dan juga penempatan jabatan. Kalimantan Tengah Amanah, merupakan cerminan aparatur birokrasi yang bersikap maupun bertindak secara jujur, profesional, kreatif dan inovatif yang dilandasi dengan nilai-nilai akhlak yang baik (*ahlakulkarimah*).

Dalam upaya mewujudkan Birokrasi Kalteng Amanah, maka diperlukan program prioritas sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan SDM aparatur birokrasi yang inovatif demi pelayanan public yang cepat dan tepat.
- ✓ Membuka ruang seluas-luasnya kepada kalangan profesional untuk menduduki jabatan public sesuai kapasitas dan kompetensinya;
- ✓ Mengoptimalkan penerapan e-government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien;
- ✓ Meningkatkan kapasitas SDM aparatur birokrasi pemerintahan melalui Pendidikan dan pelatihan khusus;
- ✓ Meningkatkan insentif khusus bagi ketua RT/RW, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang penuh dedikasi dan loyalitas.

## Berkah #6

### Kalteng Harmonis

#### Kalteng yang Toleran, Beretika, Rukun

Kalimantan Tengah Harmonis merupakan masyarakat yang hidup dengan rukun,damai,tentram dan tidak ada masalah (konflik). Pemerintah daerah Kalimantan Tengah



mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, serta agama, agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat Kalteng. Tujuan harmonis ini difokuskan pada penguatan literasi sosial berbasis tradisi dan kearifan lokal, antara lain: dialog antarbudaya dan penguatan harmoni sosial, inventarisasi data budaya dan kearifan lokal serta mendukung festival desa adat. Kegiatan-kegiatan tersebut akan menguatkan toleransi, etika berwarganegara, kesadaran multicultural, pluralisme dan kemajemukan serta kerukunan antar umat beragama, suku maupun antargolongan.

Dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kalteng yang harmonis, maka diperlukan program prioritas sebagai berikut:

- ✓ Memperkuat falsafah Huma Betang dalam kehidupan beragama, berbudaya dan bermasyarakat melalui pemberdayaan budayawan dan tokoh-tokoh adat;
- ✓ Menerbitkan peraturan dan hukum adat sebagai instrument untuk meneguhkan peradaban masyarakat yang tertib;
- ✓ Mengedepankan hukum adat dan pendekatan kebudayaan dalam mengatasi persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat;
- ✓ Memperkuat kelembagaan adat sebagai agen kebudayaan yang terkonsolidasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pembangunan berdimensi kearifan lokal.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.**

#### **1. Isu Strategis**

Isu strategis Kementerian Dalam Negeri yang terkait langsung dengan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah adalah “Stabilitas politik dalam negeri”.

- a. Berdasarkan evaluasi Indek Dekorasi Indonesia (IDI) tahun 2018 (untuk tahun 2019 tidak dilakukan masih dalam proses penilaian), terdapat peningkatan nilai skor IDI provinsi-provinsi dalam kelompok provinsi dengan nilai skor IDI “kategori sedang”.

Disamping itu, dari tiga aspek IDI (kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi) yang dilakukan pengukuran, hanya aspek lembaga demokrasi yang mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan nilai ketiga aspek tersebut untuk mencapai peningkatan nilai IDI secara keseluruhan. Belum optimalnya pembinaan organisasi kemasyarakatan, penguatan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan, revolusi mental, kewaspadaan nasional, penanganan konflik dan pendidikan politik dalam negeri. Mahalnya biaya politik untuk mendanai kegiatan Partai Politik dan Pemilu/Pilkada, menuntut adanya kenaikan kembali bantuan keuangan Partai Politik, selain itu masih kurangnya upaya peningkatan kapasitas Partai Politik dalam berbagai bentuk kegiatan yang lebih menjamin kemandirian Partai Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi, nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum.

- b. Minimnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan komunisme, maupun penolakan terhadap Pancasila terhadap ideologi negara perlu ditindaklanjuti dengan upaya yang serius dan strategis melalui pembumih nilai-nilai Pancasila.
- c. Melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya akibat pesatnya pertumbuhan perekonomian dan industri menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat dan memicu terjadinya potensi konflik sosial, menyebabkan terjadi perubahan sosial dalam masyarakat yang mengesampingkan toleransi dan gotong royong sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dalam mengembangkan usaha mendukung ekonomi dan persoalan pembangunan rumah ibadah yang memicu bentrokan antar pihak di daerah serta budaya asli Indonesia semakin luntur disebabkan maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia.
- d. Globalisasi saat ini membawa banyak dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu kewaspadaan nasional tentang pengaruh globalisasi baik pengaruh internal

maupun eksternal. Dimana saat ini mulai masuknya para peneliti asing yang melakukan penelitian di dalam negeri.

- e. Urgensi Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah dianggap perlu terhadap permasalahan yang sensitif dan prinsip yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah, di antaranya yang bersifat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dapat di lakukan langkah-langkah preventif melalui cegah dini dan deteksi dini, kerawanan potensi timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat.

## 2. Visi Kementerian Dalam Negeri

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi : *“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga

dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan public yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

### 3. Misi Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penelaahan KLHS dan penyusunan RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Sebagai daerah yang pada saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah wajib melakukan telaah dokumen KLHS. KLHS diaplikasikan pada kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) yang telah dirumuskan (tol for assesing decisions). Pelaksanaan KLHS dapat beradaptasi dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan proses pengambilan keputusan strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB Kalimantan Tengah berisikan 17 (Tujuh Belas) tujuan yang meliputi :

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan pemukiman berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13. Penanganan perubahan iklim
14. Ekosistem lautan
15. Ekosistem daratan
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB Kalimantan Tengah tersebut, maka tidak ada yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun diatas kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat,

kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat.

Memperhatikan situasi yang berkembang di Kalimantan Tengah, maka isu strategis yang diambil sejalan dengan salah satu alternatif isu strategis Kalimantan Tengah yakni **“Perwujudan Ketentraman dan Ketertiban Berbasis Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat Yang Berkeadilan”**.

Hidup di tengah masyarakat yang heterogen menuntut adanya toleransi, harmonisasi, dan kerukunan, sehingga dapat tercipta ketentraman dan ketertiban. Dalam rangka mempertahankan wilayah yang tentram dan tertib, dibutuhkan keterlibatan dan kemitraan antara pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Pemberdayaan atau penguatan kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan atau peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan perlu dilakukan secara terpadu.

Nilai-nilai budaya, agama, dan falsafah NKRI menjadi pilar yang menopang kehidupan bermasyarakat. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat dilakukan sejak usia dini baik di lingkungan formal seperti sekolah maupun informal. Dengan demikian masyarakat Kalimantan Tengah tidak saja dibangun secara fisik namun juga batin dan rohaninya untuk menjadi manusia yang berdaya saing.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Berdasarkan evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2020, ada peningkatan nilai skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah dengan kategori baik (Skor 81,16). Disamping itu, dari tiga aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi) yang dilakukan pengukuran, hanya aspek lembaga demokrasi yang mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai ketiga aspek tersebut untuk mencapai peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara keseluruhan.

Belum optimalnya pembinaan organisasi kemasyarakatan, terutama untuk penguatan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan, revolusi mental, kewaspadaan nasional, penanganan konflik dan pendidikan politik dalam negeri. Mahalnya biaya politik untuk mendanai kegiatan Partai Politik dan Pemilu/Pilkada, menuntut adanya kenaikan kembali bantuan keuangan Partai Politik, selain itu masih kurangnya juga upaya peningkatan kapasitas Partai Politik dalam berbagai bentuk kegiatan yang lebih menjamin kemandirian Partai Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi, nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum.

Memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 tahun ke depan sebagaimana tabel T-C.25.



Tabel T-C.25.

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik		Persentase Masyarakat Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Dini Konflik IPOLEKSOSBUD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Jumlah Ormas / LMS Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Ormas / LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Tabel T-C.26.

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN**

VISI : KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH: BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, DAN HARMONIS				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 2 : Memperkuat ketahanan Daerah dan Mengantisipasi Perubahan Global</b>				
1.	Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Melaksanakan Pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus Partai Politik	Peningkatan peran partai politik dan pengembangan etika, budaya berpolitik
		Meningkatnya Jumlah Ormas / LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Melakukan Pembinaan bagi Ormas, LSM dan OKP	Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Melaksanakan sosialisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila	Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
		Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat	Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
		Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Menguatkan dan mengoptimalkan kinerja Forum-forum Kesbangpol	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD serta untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Program yang sudah disusun merupakan pelaksanaan dari urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode lima tahun (2021-2026). Masing-masing program dilengkapi dengan target indikator kinerja untuk menunjukkan tingkat capaian rencana pembangunan akan dicapai.

Selain program dan kegiatan prioritas, terdapat program dan kegiatan yang bersifat rutin sebagai penunjang pada kegiatan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan lokasi serta pendanaan indikatif secara lengkap disajikan dalam tabel T-C.27 berikut :

Tabel T-C.27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun -1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Target	Rp				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik			Persentase Masyarakat Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %					
	Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	78,24 (2019)	78,25	5.578.172.250	78,50	2,020,629,000	78,75	2,020,629,000	79,00	2,020,629,000	79,25	2,020,629,000	79,25	2,020,629,000			Kesbangpol	Kalteng
	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik Dalam Negeri	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik Dalam Negeri	1 dokumen	1 dokumen	5.578.172.250	1 dokumen	2,020,629,000	1 dokumen	2,020,629,000	1 dokumen	2,020,629,000	1 dokumen	2,020,629,000	1 dokumen	2,020,629,000				
	Tersedianya Program Kerja Di Bidang Politik Dalam Negeri	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	183.906.000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000				
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Di Bidang Politik Dalam Negeri	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	-	0	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000				
	Terlaksananya Kebijakan Di Bidang Politik Dalam Negeri	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang	660 orang	317.100.000	100 orang	125,000,000	100 orang	125,000,000	100 orang	125,000,000	100 orang	125,000,000	100 orang	125,000,000				
	Terlaksananya Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang	100 orang	4.944.207.750	100 orang	1,601,179,000	100 orang	1,601,179,000	100 orang	1,601,179,000	100 orang	1,601,179,000	100 orang	1,601,179,000				
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	4 laporan	4 laporan	132.958.500	4 laporan	194,450,000	4 laporan	194,450,000	4 laporan	194,450,000	4 laporan	194,450,000	4 laporan	194,450,000				

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun -1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik			Persentase Masyarakat Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Capaian Pembinaan Terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif (Persen)	75%	75%	198.514.000	80%	100,000,000	85%	100,000,000	90%	100,000,000	95%	100,000,000	95%	100,000,000	Kesbangpol	Kalteng	
	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	198.514.000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000			
	Tersedianya Program Kerja Di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-	-	-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000			
	Tersedianya Rumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-	-	-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000			
	Terlaksananya Kebijakan Di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000			
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	50 Orang	198.514.000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000			
	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	4 laporan	100,000,000	4 laporan	100,000,000	4 laporan	100,000,000	4 laporan	100,000,000	4 laporan	100,000,000			
Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik			Persentase Masyarakat Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
	Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat Yang Mengerti Tentang Wawasan Kebangsaan (Orang)	100 orang	100 orang	969.914.900	200 orang	1,989,672,607	200 orang	1,989,672,607	200 orang	1,989,672,607	200 orang	1,989,672,607	200 orang	1,989,672,607	Kesbangpol	Kalteng	
	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 dokumen	1 dokumen	969.914.900	1 dokumen	1,989,672,607	1 dokumen	1,989,672,607	1 dokumen	1,989,672,607	1 dokumen	1,989,672,607	1 dokumen	1,989,672,607			
	Tersedianya Program Kerja Di Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	817.662.900	1 dokumen	945,483,500	1 dokumen	945,483,500	1 dokumen	945,483,500	1 dokumen	945,483,500	1 dokumen	945,483,500			
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ketahanan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	-	-	-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun -1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun																
	Terlaksananya Kebijakan Teknis Di Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	100 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000			
	Terlaksananya Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	100 orang	152.252,000	100 orang	1,044,189,107	100 orang	1,044,189,107	100 orang	1,044,189,107	100 orang	1,044,189,107	100 orang	1,044,189,107			
	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	4 laporan	100,000,000	4 laporan	100,000,000	4 laporan	100,000,000	4 laporan	100,000,000	4 laporan	100,000,000			
	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-	-	-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000			
	Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik		Persentase Masyarakat Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Meningkatnya Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Potensi Terjadinya Konflik Terkait Ipeleksosbud Yang Telah Ditangani (Persentase Kasus Yang Telah Ditangani)	70%	70%	1.665.094.000	80%	2,460,444,000	85%	2,460,444,000	90%	2,460,444,000	95%	2,460,444,000	95%	2,460,444,000	Kesbangpol	Kalteng	
	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 dokumen	1 dokumen	1.665.094.000	1 dokumen	2,460,444,000	1 dokumen	2,460,444,000	1 dokumen	2,460,444,000	1 dokumen	2,460,444,000	1 dokumen	2,460,444,000			
	Tersedianya Program Kerja Di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	-	-	-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000			
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	117.762,000	1 dokumen	138,000,000	1 dokumen	138,000,000	1 dokumen	138,000,000	1 dokumen	138,000,000	1 dokumen	138,000,000			
	Terlaksananya Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 orang	100 orang	165.961,000	100 orang	150,000,000	100 orang	150,000,000	100 orang	150,000,000	100 orang	150,000,000	100 orang	150,000,000			
	Terlaksananya Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing	56 orang	56 orang	215.047,000	56 orang	120,000,000	56 orang	120,000,000	56 orang	120,000,000	56 orang	120,000,000	56 orang	120,000,000			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun -1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dan Laporan Di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 laporan	4 laporan	365.533.000	4 laporan	335,000,000	4 laporan	335,000,000	4 laporan	335,000,000	4 laporan	335,000,000	4 laporan	335,000,000			
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4 dokumen	4 dokumen	800.791.000	4 dokumen	1,717,444,000	4 dokumen	1,717,444,000	4 dokumen	1,717,444,000	4 dokumen	1,717,444,000	4 dokumen	1,717,444,000			
<b>Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik</b>			<b>Persentase Masyarakat Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>P</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>				
	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Orang)	175 orang	240 orang	1.062.060.250	200 orang	1,368,350,000	200 orang	1,368,350,000	200 orang	1,368,350,000	200 orang	1,368,350,000	200 orang	1,368,350,000		Kesbangpol	Kalteng
	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1.062.060.250	1 dokumen	1,368,350,000	1 dokumen	1,368,350,000	1 dokumen	1,368,350,000	1 dokumen	1,368,350,000	1 dokumen	1,368,350,000			
	Tersedianya Program Kerja Di Bidang Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-	-	-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000			
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-	-	-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000			
	Terlaksananya Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	175 orang	240 orang	992.894.250	200 orang	1,268,350,000	200 orang	1,268,350,000	200 orang	1,268,350,000	200 orang	1,268,350,000	200 orang	1,268,350,000			
	Terlaksananya Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	100 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000			
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	4 laporan	69.166.000	4 laporan	100,000,000	4 laporan	100,000,000	4 laporan	100,000,000	4 laporan	100,000,000	4 laporan	100,000,000			
<b>Terlaksananya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel</b>			<b>Persentase Keterlaksanaan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>				
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	7.841.573.600	100%	8,563,532,966	100%	8,563,532,966	100%	8,563,532,966	100%	8,563,532,966	100%	8,563,532,966		Kesbangpol	Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun -1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	6 dokumen	141.151.550	6 dokumen	532.132.701	6 dokumen	532.132.701	6 dokumen	532.132.701	6 dokumen	532.132.701	6 dokumen	532.132.701			
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	10.049.800	2 dokumen	47.759.000	2 dokumen	47.759.000	2 dokumen	47.759.000	2 dokumen	47.759.000	2 dokumen	47.759.000			
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	10.737.000	1 dokumen	19.161.500	1 dokumen	19.161.500	1 dokumen	19.161.500	1 dokumen	19.161.500	1 dokumen	19.161.500			
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	10.282.500	1 dokumen	19.154.500	1 dokumen	19.154.500	1 dokumen	19.154.500	1 dokumen	19.154.500	1 dokumen	19.154.500			
	Tersedianya Penyediaan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	6.953.000	1 dokumen	4.419.000	1 dokumen	4.419.000	1 dokumen	4.419.000	1 dokumen	4.419.000	1 dokumen	4.419.000			
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.197.800	1 dokumen	4.156.000	1 dokumen	4.156.000	1 dokumen	4.156.000	1 dokumen	4.156.000	1 dokumen	4.156.000			
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	9.610.200	4 laporan	217.188.701	4 laporan	217.188.701	4 laporan	217.188.701	4 laporan	217.188.701	4 laporan	217.188.701			
	Tersedianya laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	88.321.250	4 laporan	220.294.000	4 laporan	220.294.000	4 laporan	220.294.000	4 laporan	220.294.000	4 laporan	220.294.000			
	<b>Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5.103.726.643</b>	<b>100%</b>	<b>4.856.984.573</b>	<b>100%</b>	<b>4.856.984.573</b>	<b>100%</b>	<b>4.856.984.573</b>	<b>100%</b>	<b>4.856.984.573</b>	<b>100%</b>	<b>4.856.984.573</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>Palangka Raya</b>	
	Terpenuhiya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang / bulan	37 orang / bulan	4.936.600.432	37 orang / bulan	4.681.489.073	37 orang / bulan	4.681.489.073	37 orang / bulan	4.681.489.073	37 orang / bulan	4.681.489.073	37 orang / bulan	4.681.489.073			
	Tersedianya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	159.451.000	1 dokumen	159.451.000	1 dokumen	159.451.000	1 dokumen	159.451.000	1 dokumen	159.451.000	1 dokumen	159.451.000		
	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	159.375.800	12 dokumen	159.451.000	12 dokumen	159.451.000	12 dokumen	159.451.000	12 dokumen	159.451.000	12 dokumen	159.451.000			
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.014.200	1 Laporan	7.170.200	1 Laporan	7.170.200	1 Laporan	7.170.200	1 Laporan	7.170.200	1 Laporan	7.170.200			
	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	4 dokumen	10.000000	4 dokumen	10.000000	4 dokumen	10.000000	4 dokumen	10.000000	4 dokumen	10.000000			
	Tersedianya laporan akhir tahun	Koordinasi dan Penyusunan Bahan Tanggapan Akhir Tahun	Jumlah laporan akhir tahun	-	-	-	1 laporan	10.000000	1 laporan	10.000000	1 laporan	10.000000	1 laporan	10.000000	1 laporan	10.000000			
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	1 dokumen	10.000000	1 dokumen	10.000000	1 dokumen	10.000000	1 dokumen	10.000000	1 dokumen	10.000000			
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12 laporan	12 laporan	3.736.000	12 laporan	8.874.300	12 laporan	8.874.300	12 laporan	8.874.300	12 laporan	8.874.300	12 laporan	8.874.300			



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun -1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Target	Rp				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD																	
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	12 dokumen	10.000000	12 dokumen	10.000000	12 dokumen	10.000000	12 dokumen	10.000000	12 dokumen	10.000000				
	<b>Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>10.690.500</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>22.826.300</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>22.826.300</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>22.826.300</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>22.826.300</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>22.826.300</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>22.826.300</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>Palangka Raya</b>
	Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	8.831.600	1 dokumen	8.850.000	1 dokumen	8.850.000	1 dokumen	8.850.000	1 dokumen	8.850.000	1 dokumen	8.850.000	1 dokumen	8.850.000		
	Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	1.858.900	4 laporan	13.976.300	4 laporan	13.976.300	4 laporan	13.976.300	4 laporan	13.976.300	4 laporan	13.976.300	4 laporan	13.976.300		
	<b>Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>81.265.000</b>	<b>100%</b>	<b>81.265.000</b>	<b>100%</b>	<b>81.265.000</b>	<b>100%</b>	<b>81.265.000</b>	<b>100%</b>	<b>81.265.000</b>	<b>100%</b>	<b>81.265.000</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>Palangka Raya</b>
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	1 paket	81.265.000	1 paket	81.265.000	1 paket	81.265.000	1 paket	81.265.000	1 paket	81.265.000	1 paket	81.265.000		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000		
	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000		
	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000		
	Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	-	-	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000		
	Tersedianya fasilitas pegawai pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	-	-	-	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000		
	Tersedianya Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-	-	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000		
	Tersedianya fasilitas ASN yang Dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	-	-	-	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000		
	Tersedianya fasilitas ASN untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000		
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	37 orang	10.000.000	37 orang	10.000.000	37 orang	10.000.000	37 orang	10.000.000	37 orang	10.000.000	37 orang	10.000.000		
	Tersedianya fasilitas ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	37 tahun	10.000.000	37 tahun	10.000.000	37 tahun	10.000.000	37 tahun	10.000.000	37 tahun	10.000.000	37 tahun	10.000.000		
	<b>Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum kantor</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>310.703.973</b>	<b>100%</b>	<b>989.116.505</b>	<b>100%</b>	<b>989.116.505</b>	<b>100%</b>	<b>989.116.505</b>	<b>100%</b>	<b>989.116.505</b>	<b>100%</b>	<b>989.116.505</b>	<b>100%</b>	<b>989.116.505</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>Palangka Raya</b>
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	2.823.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	31.226.000	1 paket	80.751.025	1 paket	80.751.025	1 paket	80.751.025	1 paket	80.751.025	1 paket	80.751.025	1 paket	80.751.025		
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	12.676.973	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun -1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Target	Rp				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	6 dokumen	10.162.000	6 dokumen	38.270,000	6 dokumen	38.270,000	6 dokumen	38.270,000	6 dokumen	38.270,000	6 dokumen	38.270,000	6 dokumen	38.270,000		
	Tersedianya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	253.816.000	12 laporan	745.095,480	12 laporan	745.095,480	12 laporan	745.095,480	12 laporan	745.095,480	12 laporan	745.095,480	12 laporan	745.095,480		
	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.008.284.000</b>	<b>100%</b>	<b>130.000,000</b>	<b>100%</b>	<b>130.000,000</b>	<b>100%</b>	<b>130.000,000</b>	<b>100%</b>	<b>130.000,000</b>	<b>100%</b>	<b>130.000,000</b>	<b>100%</b>	<b>130.000,000</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>Palangka Raya</b>
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 unit	703.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	703.650.000				
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	13 unit	304.634.000	4 unit	130.000,000	4 unit	130.000,000	4 unit	130.000,000	4 unit	130.000,000	4 unit	130.000,000	4 unit	130.000,000		
	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.071.157.145</b>	<b>100%</b>	<b>1.184.752,887</b>	<b>100%</b>	<b>1.184.752,887</b>	<b>100%</b>	<b>1.184.752,887</b>	<b>100%</b>	<b>1.184.752,887</b>	<b>100%</b>	<b>1.184.752,887</b>	<b>100%</b>	<b>1.184.752,887</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>Palangka Raya</b>
	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan	1.000.000	4 laporan	3.500.000	4 laporan	3.500.000	4 laporan	3.500.000	4 laporan	3.500.000	4 laporan	3.500.000	4 laporan	3.500.000		
	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	228.734.185	4 laporan	237.662,887	4 laporan	237.662,887	4 laporan	237.662,887	4 laporan	237.662,887	4 laporan	237.662,887	4 laporan	237.662,887		
	Tersedianya Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	841.422.960	4 laporan	943.590,000	4 laporan	943.590,000	4 laporan	943.590,000	4 laporan	943.590,000	4 laporan	943.590,000	4 laporan	943.590,000		
	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>195.860.000</b>	<b>100%</b>	<b>766.455,000</b>	<b>100%</b>	<b>766.455,000</b>	<b>100%</b>	<b>766.455,000</b>	<b>100%</b>	<b>766.455,000</b>	<b>100%</b>	<b>766.455,000</b>	<b>100%</b>	<b>766.455,000</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>Palangka Raya</b>
	Tersedianya pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	102.360.000	21 Unit	220.000,000	21 Unit	220.000,000	21 Unit	220.000,000	21 Unit	220.000,000	21 Unit	220.000,000	21 Unit	220.000,000		
	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	49.150.000	1 unit	428.735,000	1 unit	428.735,000	1 unit	428.735,000	1 unit	428.735,000	1 unit	428.735,000	1 unit	428.735,000		
	Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	20 Unit	35 Unit	24.830.000	20 Unit	82.370,000	20 Unit	82.370,000	20 Unit	82.370,000	20 Unit	82.370,000	20 Unit	82.370,000	20 Unit	82.370,000		
	Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	30 Unit	32 Unit	19.520.000	30 Unit	35.350,000	30 Unit	35.350,000	30 Unit	35.350,000	30 Unit	35.350,000	30 Unit	35.350,000	30 Unit	35.350,000		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang akan direncanakan menjadi tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel T-C.28**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN**  
**DAN SASARAN RPJMD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	1. Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	78,25	78.50	78.75	79.00	79.25	79.25
		Meningkatnya Jumlah Ormas / LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	2. Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen)	75%	80%	85%	90%	95%	95%
		Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	3. Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang)	100 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
		Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	4. Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	70%	80%	85%	90%	95%	95%
		Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (orang)	240 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang

Sumber : Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan kesatuan bangsa dan politik untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan kesatuan bangsa dan politik dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 - 2026.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja, pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA serta sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau target kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus ditingkatkan sehingga hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini.

Palangka Raya, Desember 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**ANDI ARSYAD, S.T**

Panitia TK. I (IV/b)

NIP. 19650817 198603 1 032